

OPTIMALISASI FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DAN ROB DI KOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH

Diah Utami Sekar Sari

NPP. 30.0661

Asdaf Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah

Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Email: diahutamisekarsari12@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. M. Amin, MM, M.Ak

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The problems of Pekalongan City that are easy to identify and often occur are flood and tidal problems, because topographically the Pekalongan City area is located in the lowlands of the north coast of Java Island with a land elevation of 0-6 meters above sea level. The entire area of Pekalongan City has a slope of 0-8%. This condition can illustrate that the entire area of Pekalongan City is very flat, the height difference is very small and even in certain places it is identified as having a height below sea level such as in the Customs Area, Padukuhan Karton Village, North Pekalongan District. This condition indicates land subsidence in the City of Pekalongan. Based on research and expert opinion, land subsidence in Pekalongan City is a threat to the development of the city area in the future, so attention is needed to overcome it. Global warming is also a factor in rising sea levels. The Regional Government of Pekalongan City, supported by the Central Government and the Provincial Government of Central Java, has carried out various developments of facilities and infrastructure in tackling the flood and tidal disaster. There are several things that still trigger the high area of flooding and tidal floods; 1. Urban drainage that is not yet optimal, 2. Land has decreased by around 3-4 meters per year, 3. Lack of quality of residential environment. **Purpose:** : to find out whether the functions of the public works and spatial planning services are optimal or not in tackling floods and tidal disasters, knowing the description and analysis of the supporting factors and inhibiting factors in optimizing the functions of the public works and spatial planning services in flood and tidal disaster management, knowing what efforts are being made carried out by the public works and spatial planning services in tackling floods and tidal disasters in Pekalongan City. **Method:** This study uses qualitative methods with a descriptive approach. The theory used is the Optimization Theory of Machfud Sidiq. The data collection technique used is observation, in-depth interviews with 5 informants and documentation. **Result:** The findings obtained by the authors in this study are the public works and spatial planning services for the city of Pekalongan in tackling floods and tidal disasters which are supported by the Central Government and the Provincial Government of Central Java by conducting outreach to the community, building flood control pumping stations, building embankments to control tidal floods, cleaning and draining urban drainage on a regular basis. **Conclusion:** optimizing the functions of the public works department and spatial planning in dealing with floods and tidal disasters has been running optimally, this is evidenced by the reduction in the area of flood and tidal inundations through programs carried out by the DPUPR of Pekalongan City.

Keywords: Optimization, Flood and Rob Disaster Management

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): permasalahan Kota Pekalongan yang mudah diidentifikasi dan sering terjadi yaitu masalah banjir dan rob, karena secara topografi wilayah Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai utara pulau Jawa dengan ketinggian lahan 0-6 meter dpl. Keseluruhan wilayah Kota Pekalongan lereng 0-8%. Kondisi ini dapat menggambarkan bahwa keseluruhan wilayah Kota Pekalongan sangat datar, beda tinggi yang sangat kecil dan bahkan di beberapa tempat tertentu teridentifikasi memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut seperti di Kawasan Pabean, Kelurahan Padukuhan Karton, Kecamatan Pekalongan Utara. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya penurunan permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan. Berdasarkan penelitian dan pendapat ahli, penurunan tanah di Kota Pekalongan menjadi ancaman bagi pengembangan wilayah kota kedepannya sehingga perlu perhatian untuk menanggulangnya. Pemanasan global juga menjadi faktor meningkatnya permukaan air laut. Pemerintah Daerah Kota Pekalongan didukung oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan berbagai pembangunan sarana dan prasana dalam menanggulangi bencana banjir dan rob tersebut. Ada beberapa hal yang masih menjadi pemicu tingginya luasan banjir dan rob; 1. Drainase perkotaan yang belum optimal, 2. Tanah mengalami penurunan sekitar 3-4 meter per tahun, 3. Kurangnya kualitas lingkungan permukiman. **Tujuan:** untuk mengetahui fungsi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang sudah optimal atau belum dalam menanggulangi bencana banjir dan rob, mengetahui deskripsi dan analisis terhadap faktor pendukung dan faktor penghambat dalam optimalisasi fungsi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam penanggulangan bencana banjir dan rob, mengetahui upaya apa saja yang dilakukan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam menanggulangi bencana banjir dan rob di Kota Pekalongan. **Metode:** penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan adalah Teori Optimalisasi dari Machfud Sidiq. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam dengan 5 informan serta dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota pekalongan dalam menanggulangi bencana banjir dan rob yang didukung oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, pembangunan stasiun pompa pengendali banjir, pembangunan tanggul guna pengendalian rob, pembersihan dan pengurusan drainase perkotaan secara rutin. **Kesimpulan:** optimalisasi fungsi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam penanggulangan bencana banjir dan rob sudah berjalan dengan optimal hal ini dibuktikan dengan menurunnya luas genangan banjir dan rob melalui program-program yang dilakukan oleh DPUPR Kota Pekalongan.

Kata kunci: Optimalisasi, Penanggulangan Bencana Banjir dan Rob

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia menjadi negara maritim yang mempunyai beragam kekayaan didalamnya. Namun dengan kekayaan tersebut Indonesia menjadi negara yang rawan terhadap bencana. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengganggu dan mengancam kehidupan banyak orang yang disebabkan oleh faktor alam dan tidak wajar dan mengakibatkan hilangnya nyawa, kerusakan lingkungan,

psikologis, kerugian dan kerusakan material. Letak geografis Indonesia yang terletak diantara 2 Samudra dan 2 Benua yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta Benua Asia dan Benua Australia. Letak Astronomi Indonesia 6° LU - 11° LS dan 95° BT - 141° BT. Berdasarkan data tersebut Indonesia menjadi negara yang dilalui oleh Sirkum Pasifika tau Cincin Api Pasifik yaitu bertemunya lempeng tektonik sehingga mengakibatkan terbentuknya gunung berapi. Selain itu Indonesia merupakan wilayah Sabuk Alpide, dimana itu terbentuyuk dari bertemunya Lempeng Eurasia, Lempeng India, Lempeng Australia dan itu mengakibatkan terjadinya gempa bumi. Wilayah Indonesia yang beriklim tropis ini juga dapat menyebabkan angin topan dan badai. Serta wilayah Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi dan mengakibatkan banjir. Menurut BNPB, banjir adalah kejadian ataupun kondisi dimana terendamnya sebuah wilayah atau daratan akibat daya tamping air yang meninggi (BNPB, n.d.). Di Indonesia sendiri banjir disebabkan oleh berbagai faktor alam seperti intensitas hujan yang tinggi. Letak geografis dan kondisi pasang surut air laut serta faktor manusia berupa membuang sampah sembarangan, menebang pohon secara liar yang mengakibatkan daerah resapan tidak ada. Kegiatan pasang surut laut tersebut juga dapat mengakibatkan bencana alam yang biasa disebut rob. Banjir rob diakibatkan oleh air laut menggenangi daratan yang lebih rendah tetapi bukan hanya itu curah hujan yang tinggi menjadi faktor terjadinya banjir rob ini karena air melambat masuk ke laut sehingga air tertahan di daratan. Provinsi Jawa Tengah merupakan Provinsi yang rawan terjadinya bencana menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat Jawa Tengah menjadi Provinsi yang paling banyak dilanda bencana alam sejak tahun 2016-2020, yakni mencapai 3.693 kejadian. Jawa Tengah menempati posisi pertama lantaran potensi ancaman bencana alamnya cukup besar. Salah satunya karena provisi tersebut dilalui oleh patahan Kendeng. Patahan Kendeng pernah bergerak beberapa tahun silam, sehingga risiko gempa bumi mungkin terjadi. Ada pula pertemuan dua lempeng di Bagian Selatan Jawa Tengah yang dapat menimbulkan gempa dan tsunami. Bagian Pantai Utara Jateng merupakan Kawasan yang rawan banjir. Sementara Bagian Tengah Jateng rawan terjadinya longsor (monavia, 2021). Permasalahan Kota Pekalongan yang sering terjadi adalah masalah banjir dan rob, karena secara topografi wilayah Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai utara pulau jawa dengan ketinggian lahan 0-6 meter dpl. Keseluruhan wilayah Kota Pekalongan lereng 0-8%. Kondisi ini menggambarkan bahwa keseluruhan wilayah Kota Pekalongan sangat datar, bahkan di beberapa tempat tertentu telah teridentifikasi memiliki ketinggian dibawah permukaan air laut seperti di Kawasan Pabean, Kelurahan Padukuhan Kraton, Kecamatan Pekalongan Utara. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya penurunan permukaan tanah. Berdasarkan penelitian dan pendapat tanah di wilayah Kota Pekalongan telah terjadi secara signifikan dan menjadi salah satu ancaman bagi pengembangan wilayah kota ke depannya sehingga harus mendapatkan perhatian untuk menanggulangnya. Pemasasan global juga menjadi faktor meningginya permukaan air laut (Pemkot Pekalongan, 2021)

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Satu faktor terpenting dalam terjadinya bencana banjir dan rob pada Kota Pekalongan tersebut adalah kurang optimalnya penataan sistem drainase kota. Sekitar tahun 2020 Pemerintah Kota Pekalongan memiliki sekitar 21 pompa yang digunakan dalam menanggulangi banjir. Pompa serta sarana prasarana yang lain seperti saluran pintu pengendali banjir, tanggul perlu peningkatan. Tanggul-tanggul yang telah dibentuk tidak cukup kuat menahan gelombang air laut walaupun seperti itu Pemerintah Kota Pekalongan sudah mengerjakan berbagai program guna menanggulangi abrasi yang terjadi. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dengan penguatan reventment pesisir laut yang dalam pengerjaannya telah rampung pada tahun 2015 lalu. Sekitar Bulan Juni 2022 banjir dan rob menggenangi daerah di Kota Pekalongan sehingga mengakibatkan ratusan rumah tergenang air mencapai 1 meter sekitar pukul 14.00-17.00 wib (Bernardi, 2022). Banjir dan rob tersebut terjadi tanggul di beberapa daerah jebol selain menggenangi daerah pemukiman banjir dan

rob tersebut menggenangi jalanan serta fasilitas umum. Dalam menanggulangi banjir dan rob yang terjadi di Kota Pekalongan maka DPUPR harus memperhatikan Perencanaan dan Pembangunan Fasilitas Kota meliputi irigasi atau saluran pengairan dan drainase atau daerah resapan air karena irigasi dan drainase yang belum optimal bisa menyebabkan bencana banjir. Menurunnya kapasitas jumlah menampung air pada sungai serta drainase disebabkan oleh adanya endapan. Kawasan pemukiman liar pada badan sungai dan masih kurangnya daerah resapan di daerah sungai. Di saat musim hujan tiba sering terjadi peningkatan volume dan debit air sehingga mengakibatkan banjir di suatu daerah. Sedangkan akibat meningkatnya debit air disebabkan curah yang tinggi, perubahan terhadap tata penggunaan lahan, kerusakan lingkungan di daerah aliran sungai pada suatu tempat. Ada beberapa hal yang masih menjadi pemicu tingginya luasan banjir dan rob yaitu: 1. Drainase perkotaan yang belum optimal, 2. Tanah mengalami penurunan sekitar 3-4 cm per tahun, 3. Kurangnya kualitas lingkungan pemukiman (Pemkot Pekalongan, 2021)

1.3. Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan beberapa sumber dalam penelitiannya untuk mengkaji serta mengembangkan referensi yang berkaitan optimalisasi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam penanggulangan bencana banjir dan rob di Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. Penelitian (Wulandari, 2022) berjudul *Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Pengendalian Banjir di Kota Surakarta*, menemukan bahwa DPUPR dalam pengendalian banjir di Surakarta berperan sebagai coordinator, fasilitator dan stimulator. Dalam pengendalian banjir masih ada kendala yaitu kurang cepatnya tindakan atau penanganan keluhan dan kurang optimalnya dalam penyampaian informasi perbaikan fasilitas dan penggunaan media keluhan. Kurang sosialisasi kepada masyarakat mengenai adanya perauran, izin, dan retribusi terhadap penutupan saluran atas sungai maupun drainase sehingga masih banyak masyarakat menutup saluran tanpa izin. Penelitian (Kosanke, 2019) berjudul *Strategi Pemerintah Dalam Penanggulangan Banjir Studi di DPUPR Kota Manado* menemukan bahwa aspek jangka Panjang organisasi sudah berjalan dengan baik hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya berbagai metode perencanaan, upaya dan program yang dirumuskan dan dilapangan. Adanya perbaikan dan pelebaran saluran drainase, pengerukan dan pembersihan daerah aliran sungai serta normalisasi sungai. Penelitian (Miftakhudin, 2021) berjudul *Strategi Penanganan Banjir Rob Kota Pekalongan* menemukan bahwa belum optimalnya fasilitas dan sistem drainase, terdapat penyempitan pada daerah aliran sungai, mendapat dukungan penuh dari pemerintah serta instansi terkait dalam penanggulangan bencana banjir dan rob. Penelitian (Mubarak et al., 2017) berjudul *Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Terhadap Pengendalian Banjir Di Samarinda* menemukan bahwa Dinas PUPR dalam perumusan program pengendalian banjir melihat kondisi di Samarinda dipadukan dengan usulan dari beberapa unsur di luar instansi yakni masyarakat, pemerintah tingkat kelurahan hingga kecamatan. Dinas PUPR melaksanakan program tersebut dalam rangka perencanaan spasial dan penataan ruang wilayah kota. Dinas PUPR melakukan pengawasan dan pengendalian program pengendalian banjir guna menyelaraskan fungsi, standar infrastruktur serta meminimalisir kerusakan. Dinas PUPR melaksanakan evaluasi program pengendalian banjir dalam rangka memantau pelaksanaan program secara regular.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni optimalisasi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam penanggulangan bencana banjir dan rob yang terjadi di Kota Pekalongan. Hal ini biasa dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah tapi dalam penelitian ini dilakukan oleh

DPUPR karena dalam penanggulangan bencana tersebut diperlukan perencanaan dan pembangunan fasilitas kota meliputi irigasi dan drainase. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang diharapkan pembaca bias mengetahui penelitian ini lebih mendalam. Dengan indicator teori; 1. Tujuan, 2. ALternatif Keputusan, 3. Sumber Daya yang Dibatasi, menurut Teori Optimalisasi Machfud Sidik (2001)

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai apa aja yang dilakukan oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam penanggulangan bencana banjir dan rob. Dengan berbagai program yang dilakukan doleh DPUPR diharapkan dapat mengurangi bencana tersebut di kemudian hari.

II. METODE

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu metode pendekatan kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2017) metode penelitian merupakan cara ilmiah guna mendapatkan data untuk mencapai tujuan dan kegunaan tertentu. Sehingga hal tersebut diperlukan kunci yang harus diperhatikan yaitu; cara ilmiah, data, tujuan serta kegunaan. Cara ilmiah dapat diartikan sebagai aktivitas dalam penelitian yang berdasarkan rasional, empiris serta sistematis. Ciri-ciri keilmuan rasional dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian yang cara logis sehingga dapat dimengerti orang lain. Selanjutnya ciri keilmuan empiris yang artinya kegiatan penelitian tersbut dapat dilihat dengan mata manusia serta mengetahui cara apa yang digunakan. Yang terakhir ciir ilmuan sistematis memiliki maksud sebuah proses yang menggunakan langkah-langkah yang masuk akal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan berkaitan dengan manusia yang pada dasarnya bergantung pada pengamatan

Menurut (Sugiyono, 2017) yang dimaksud Teknik pengumpulan data adalah sebuah langkah paling strategis penelitian dengan tujuan utama untuk mendapatkan data. Dengan informan yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 1 orang, Kepala Bidang Sumber Daya Air sebanyak 1 orang, Kepala Seksi Pengendali Banjir dan Rob sebanyak 1 orang dan Masyarakat sebanyak 2 orang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis optimalisasi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam penanggulangan bencana banjir dan rob di Kota Pekalongan menggunakan Teori Machfud Sidik (2001)

3.1. Analisis Optimalisasi Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Penanggulangan Bencana Banjir dan Rob di Kota Pekalongan

a. Tujuan

Dalam menentukan kegiatan untuk bias dilaksanakan secara optimal diperlukan tujuan yang jelas. Karena dengan tujuan yang jelas, rangkaian kegiatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (RPJMD) membuat target daerah Kota Pekalongan pada sektor pekerjaan umum dan penataan ruang khususnya dalam penanggulangan bencana banjir dan rob. Dalam hal ini DPUPR sebagai antisipasi (mitigasi) sebelum terjadinya bencana.

b. Alternatif Keputusan

Saat memiliki tujuan ada sebuah kebijakan atau rangkaian kegiatan untuk melaksanakan dan mencapai tujuan tersebut dengan baik. Dimana dalam melaksanakan tujuan tersebut tidak

selalu berhasil, disetiap mencapai tujuan pasti akan adanya hambatan. Sehingga diperlukan kebijakan dalam pengambilan keputusan tersebut. Pengambilan keputusan merupakan tahap akhir dalam proses pemikiran untuk menjawab dalam mengatasi masalah yang terjadi dengan menentukan pilihan pada suatu alternative keputusan. Dalam pengambilan keputusan biasanya ada beberapa pilihan alternative keputusan agar lebih efisien dalam mencapai tujuan tersebut.

c. Sumber Daya yang Dibatasi

Untuk mencapai suatu tujuan banyak mengalami permasalahan yang akan dihadapi. Salah satunya adalah sumber daya sehingga diperlukan pembatasan sumber daya yang efisien agar tujuan tersebut dapat berjalan secara efektif. Sumber daya yang dibatasi biasanya pada anggaran, karena dalam menjalankan kegiatan sering terhalan oleh anggaran.

3.2. Analisis Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Penanggulangan Bencana Banjir dan Rob di Kota Pekalongan

a. Faktor Pendukung

- a) Peran Pemerintah : Pemerintah Kota Pekalongan menggunakan beberapa sarana dan prasarana untuk operasional guna menanggulangi bencana tersebut diantaranya seperti stasiun pompa pengendali banjir, pompa mobil, alat berat untuk pengerukan saluran, armada dump truck, mini dump truck dan kendaraan roda 3
- b) Anggaran : Anggaran tersebut tidak hanya melalui APBD Kota Pekalongan saja tapi juga dapat diajukan dengan anggaran dari APBN dan juga APBD Provinsi Jateng. Anggaran ini dialokasikan untuk kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan operasional rutin sarpras.

b. Faktor Penghambat

- a) Peran Masyarakat : Masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan serta membangun bangunan di pinggiran sungai sehingga ketika hujan deras sungai tidak mampu menopang debit air.
- b) Pemerintah Daerah Lain : Adanya limpasan sungai dari daerah lain yang masuk kedalam wilayah Kota Pekalongan dan memberikan tugas serta tanggung jawabnya kepada Pemerintah Kota.

3.3. Analisis Upaya yang Dilakukan Untuk Menanggulangi Bencana Banjir dan Rob di Kota Pekalongan

a. Sosialisasi

Sosialisasi ini bekerjasama dengan instansi Bappeda, BPBD, Kecamatan/Kelurahan, Dinas Pusdataru, BBWS Pemali Juana dan masyarakat setempat.

b. Pembangunan Stasiun Pompa Pengendali Banjir

Pembangunan ini berada di beberapa titik rawan bencana. Stasiun pompa air ini di operasikan dengan jadwal shift kerja selama 24 jam yang nantinya air tersebut akan mengalir ke laut.

c. Pembangunan Tanggul Guna Pengendali Rob

Dalam pengendalian rob yang terjadi di Kota Pekalongan, pemerintah membangun tanggul pantai untuk menghalau gelombang air laut

d. Pembersihan dan Pengurasan Drainase Perkotaan Secara Rutin

Untuk mencegah penurunan fungsi drainase, perlu dilakukan pemeliharaan rutin minimal dengan melakukan pembersihan sampah dan pengerukan sedimen pada saluran air.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Optimalisasi Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Penanggulangan Bencana Banjir dan Rob di Kota Pekalongan ini dilakukan oleh DPUPR karena dalam pelaksanaan penanggulangan pemerintah harus memperhatikan perencanaan dan pembangunan fasilitas kota meliputi irigasi dan drainase. Mengingat hal tersebut, Kota Pekalongan menyusun Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 perihal Rencana Tata Ruang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029. Dalam Peraturan Daerah tersebut dijelaskan tujuan penataan ruang guna mewujudkan Kota Jasa, Industri serta Perdagangan Batik serta Minapolitan yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. Penelitian sebelumnya biasanya oleh BPBD tetapi di Kota Pekalongan sendiri dinas terkait yang menanggulangi bencana banjir dan rob menurut RPJMD Kota Pekalongan dilakukan oleh DPUPR karena termasuk dalam tata kelola ruang Kota Pekalongan.

4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan bahwa dalam penanggulangan bencana banjir dan rob di Kota Pekalongan sudah berjalan cukup optimal mengingat setiap tahunnya banjir dan rob yang terjadi mengalami presentasi penurunan

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa :

- a. optimalisasi fungsi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam penanggulangan bencana banjir dan rob sudah berjalan dengan optimal dibuktikan dengan luas genangan banjir dan rob di Kota Pekalongan mulai menurun melalui program sosialisasi, pembangunan staisun pompa air, pembangunan tanggul pengendali rob, pembersihan dan pengurusan drainase perkotaan secara rutin sehingga bias menciptakan perlindungan kepada masyarakat.
- b. Pemerintah dan anggaran merupakan faktor pendukung dalam penanggulangan bencana banjir dan rob melalui pembangunan staisun pompa banjir, pompa mobil, alat berat, armada dump truck, kendaraan roda 3, mendapat alokasi dana yang cukup besar tidak hanya APBD Kota tetapi dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah. Faktor penghambat adanya peran masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan dan membangun bangunan di pinggi sungai ditambah lagi adanya limpasan dari daerah lain.
- c. Upya pemerintah Kota Pekalongan khususnya DPUPR dalam penanggulangan bencana banjir dan rob yang terjadi dengan sosialisasi, pembangunan tanggul pengendali rob, pembangunan stasiun pompa air pengendali banjir, pembersihan dan pengurusan drainase perkotaan secara rutin.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan optimalisasi fungsi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam penanggulangan bencana banjir dan rob di Kota Pekalongan

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Bernardi, R. (2022). *Banjir Rob di Kota Pekalongan, BPBD Ungkap Pemicunya*. DetikJateng. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6145692/banjir-rob-di-kota-pekalongan-bpbd-ungkap-pemicunya>

BNPB. (n.d.). *Definisi Bencana*. Bnpb.Go.Id. <https://www.bnpb.go.id/definisi-bencana#:~:text=Banjir adalah peristiwa atau keadaan,aliran sungai pada alur sungai.>

Kosanke, R. M. (2019). *Strategi Pemerintah dalam Penanggulangan Banjir (Studi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado)*. 2(2), 1–11.

Miftakhudin, S. (2021). Strategi Penanganan Banjir Rob Kota Pekalongan. *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 20(1), 29–38. <https://doi.org/10.54911/litbang.v20i.142>

monavia. (2021). *Jawa Tengah Jadi Provinsi Paling Banyak Dilanda Bencana Alam*. Katadata Media Network. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/09/jawa-tengah-jadi-provinsi-paling-banyak-dilanda-bencana-alam>

Mubarak, Idris, A., & Alaydrus, A. (2017). Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Terhadap Pengendalian Banjir Di Samarinda. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 171–184.

Pemkot Pekalongan. (2021). *Rancangan Akhir RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026* /. 1–510.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV.

Wulandari, K. (2022). *Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Pengendalian Banjir di Kota Surakarta*. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/sldrts/article/view/6734>

